

## Aktifis Muslim dalam Pergulatan Politik Islam dan Nasionalisme: Studi Kasus di Baitul Muslimin Jakarta

Zainal Arifin

STAI Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia

Corresponding Author  zainalarifinswmg1@gmail.com

### ABSTRAK

Terdapat dua kekuatan besar yang selalu berusaha keras untuk menerapkan ideologi politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua kekuatan tersebut adalah “Islamis dan Nasionalis sekuler”. Mulai pra kemerdekaan sampai dengan era reformasi, dua kekuatan tersebut masih mempunyai idealisme untuk menegakkan ideologinya masing-masing dalam konteks kenegaraan di Indonesia. Perdebatan para aktivis pada waktu orla dan orba masih bergulat antara pemikiran politik Islam dan nasionalis yang dalam ranah perdebatan tekstual sudah mulai berpikir dewasa pada masa Reformasi, sehingga pergulatan kedua politik di Negara ini harus disikapi oleh para aktivis secara bijaksana dalam mengembalikan Esensi dari tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Peneliti melakukan observasi lapangan dengan melakukan wawancara serta mengajukan pertanyaan Kebeberapa Tokoh Baitul Muslimin Indonesia dan Tokoh Ormas agama seperti NU dan Muhammadiyah yang mendukung dengan berdirinya Sayaf Islam di PDI-Perjuangan. Terutama dukungan Ketua PBNU Hasyim Muzadi dan Dinsyamsuddin. Serta banyak tokoh intelektual antara lain Bang Taufiek kiemas, Buya Syafii Maarif dan Said Aqil Siradj bersama Ormas Pemuda kedua Ormas Islam di Indonesia Tersebut. Aktifis Baitul Muslimin Indonesia PDI-Perjuangan mempunyai peranan meminimalisir pergulatan politik Islam dan Nasionalisme sehingga tidak ada lagi dikotomi diantara keduanya dengan artian sudah mencairnya pergulatan kedua politik tersebut, dengan peranya menyelesaikan masalah sosial masyarakat, berdakwah untuk memberikan pemahaman Agama di masyarakat dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dimasa yang akan datang adalah kukuhnya paradigma Islam kebangsaan, yang telah diwariskan oleh Founding Fathers.

Keywords: Aktifis Muslim, Pergulatan Politik Islam, Politik Islam dan Nasionalisme

Journal Homepage <http://ojs.staiaalfurqan.ac.id/alqiyam>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

### PENDAHULUAN

Melihat peran aktivis muslim atau santri yang dibuktikan dengan pembangunan Baitul Muslimin di Kantor Pusat DPP PDI-Perjuangan menunjukkan bahwa ulama sebagai pengendali dan pembentuk moral (Husna Nashihin, 2017) bangsa tidak hanya berjuang pada pencapaian kekuasaan saja, tapi berusaha untuk menempatkan Islam pada fungsinya sebagai agama rahmat. Pergulatan politik saat ini sudah mulai mengesampingkan etika politik itu sendiri maka sangat benar bahwa ketika ulama mengambil bagian dalam bernegara dalam mengendalikan moral bangsa dan fungsinya untuk ikut membenahi karakter bangsa (Ardianta, 2022) yang besar ini.

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan multikultural, etnis, suku, agama, budaya sangat rawan untuk terjadi disintegrasi bangsa (Nasihini & Puteri Anggita Dewi, 2019). Hal inilah yang menjadi keterbukaan PDI-Perjuangan untuk benar-benar menjadikan ulama sebagai pemersatu bangsa dan membentuk karakter (Nasihini, 2019) dari kadernya. Pembentukan serta pembangunan Baitul Muslimin di markas PDI-Perjuangan sangat jelas bahwa masyarakat Islam sudah dewasa

dalam berpolitik tanpa harus memetak-metakkan kepentingan.

PDI-Perjuangan yang merupakan partai nasionalis yang basis massanya banyak masyarakat abangan harus siap untuk menjadi contoh dari partai-partai nasionalis yang lain. Keterbukaan PDI-Perjuangan harus diberikan aplaus dari berbagai pihak karena partai yang sudah cukup lama mewarnai perpolitikan Indonesia mau membuka diri untuk menerima perubahan Intern PDI-Perjuangan.

Banyaknya Intelektual muda yang ada pada partai PDI-Perjuangan dan intelektual muda muslim Indonesia yang sudah merapatkan diri pada partai PDI-Perjuangan membuktikan bahwa PDI-Perjuangan yang benar-benar menerima keterbukaan dalam berdemokrasi. Dalam konteks ini saya sepakat bahwa pendapat cendekiawan muslim, Nurcholis Madjid tentang pernyataannya yang mengatakan “Islam yes partai Islam no” (Susanto, 2022) dalam konteks ini saya memahami bahwa Islam lahir dan ada untuk menjadi agama rohmah yang perannya lebih universal.

Dalam penelitian di markas DPP PDI-Perjuangan peneliti ingin mengetahui beberapa besar peran aktivis muslim di Baitul Muslimin dalam menyikapi kondisi PDI-Perjuangan dengan berusaha melihat berapa besar perannya untuk memberikan wadah didalam bagi penguatan politikus muda muslim yang menjadi kader PDI-Perjuangan.

Dalam penelitian di kantor DPP PDI-Perjuangan peneliti juga ingin mengetahui beberapa besar peran ulama dalam menyikapi kondisi PDI-Perjuangan dengan berusaha melihat berapa besar perannya untuk memberikan wadah didalam bagi penguatan politikus muda muslim yang menjadi kader PDI-Perjuangan. Peresmian Baitul Muslimin yang diantaranya dihadiri tokoh ulama Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua PBNU K. H. Hasyim Muzadi.

Konsep keagamaan (kerohanian) (Julkifli, 2022) bagi kita keadilan sosial yang dimulai dari lapisannya yang paling bawah, yaitu rakyat jelata perlulah ditegaskan disini bahwa “zakat” bukanlah sesuatu yang khusus pada agama Muhammad SAW. Al-Qur’an sendiri menyatakan bahwa Nabi Isa pun telah mencanangkan enam abad sebelumnya. ia berkata aku ini adalah hamba Tuhan yang telah memberikan kepadaku kitab, menjadikan aku nabi dan memberkatiku dimanapun aku berada, serta mewasiatkan kepadaku sholat dan zakat selagi umat masih ada (QS. Maryam: 30-310).

Harapan PDI-Perjuangan dengan memberi peran ulama atau tokoh agama dan aktivis muslim (santri) dalam menjelaskan kadernya dalam memahamii konteks hidup beragama dan bernegara (Robbaniyah, 2022), dalam artian mengkaji dua pemikiran tokoh, dalam pemikiran Soekarno yang memisahkan agama dan negara dalam konteks pemisahan agama dan negara. Soekarno beranggapan bahwa persoalan agama dapat diselesaikan oleh pemeluk agama itu sendiri tanpa campur tangan negara sehingga agama bisa berkembang dan agama juga dapat memberikan masukan untuk negara.

Selain ini pemikiran Soekarno dalam politik Islam dan nasionalisme bisa dijadikan pengkajian dalam pergulatan politik saat ini. Selain ini juga sebagai akulturasi kedua pemikiran politik tersebut. dalam hal ini, penulis ingin mengetahui klaim-klaim terhadap agama dan partai dalam pandangan para aktivis Baitul Muslimin di DPP PDI-Perjuangan di Jakarta.

Pengayaan informasi atau data dalam tesis yang mau peneliti susun dengan melihat kemajuan perpolitikan di Indonesia terutama pada partai demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan yang sangat dekat dengan sang proklamator dan merupakan penjelmaan PNI pada era Soekarno. Penulis berusaha menarik benang merah antara partai PNI era Soekarno dengan adanya Jamiatul Muslimin sebagai tempat ormas Islam di PNI dan juga mau melihat atau mengkaji sisi keislaman Soekarno dan pemahaman nasionalismenya, maka hal ini yang menarik untuk dikaji.

Jakarta-satu lagi keorganisasian massa bercorak Islam lahir di tanah air. Kali ini, untuk menampung ulama-ulama Islam yang nasionalis serta nasionalis yang ulama (Julkifli, 2022), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membentuk sayap baru bercorak keislaman, yakni Baitul Muslimin Indonesia. Ormas baru ini dideklarasikan Kamis (29/3) siang ini di Markas DPP PDI-Perjuangan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta.

Acara deklarasi ini dihadiri tokoh-tokoh Islam seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PB Nahdhatul Ulama K.H. Hasyim Muzadi, cendekiawan muslim seperti

Azyumardi Azra serta Said Aqill Siradj. Ratusan ulama dari Matlaul Anwar, Banten, kyai-kyai khost dari Jawa Barat serta DKI Jakarta akan menyemarakkan berdirinya Baitul Muslimin Indonesia.

Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan pendirian Baitul Muslimin Indonesia tidak ada kaitannya dengan persiapan Pemilu Presiden 2009, tetapi lebih dari keinginan untuk menampung gairah Islam yang ada di kalangan nasionalis.

“Saya berharap dengan berdirinya Baitul Muslimin tidak mengkotak- kotakkan antara ormas Islam yang sudah ada. Justru kita akan bersama- bersama untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar” kata Megawati seperti diungkapkan staf khusus bidang pers dan media mantan Presiden Megawati, Arie Junaedi.

Menurut Megawati Soekarnoputri, sejak awal, PDI-Perjuangan selalu mengakomodasi kepentingan umat, tidak saja dalam kiprah kepemimpinannya semasa menjabat Presiden, maupun setelah sekarang PDI-Perjuangan menjadi partai oposisi. Sikap konsistensi Megawati Soekarnoputri dan PDI-Perjuangan yang tidak pernah kompromi dalam membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina serta perjuangan nuklir Iran telah terbukti selama ini.

Deklarasi Baitul Muslimin Indonesia melengkapi sayap - sayap organisasi yang dimiliki PDI-Perjuangan seperti sayap organisasi kewanitaan (Srikandi Demokrasi Indonesia) dan kepemudaan (Banteng Muda Indonesia). Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Prof. Maswadi Rauf ketika dimintai tanggapannya mengatakan sangat wajar bila PDI-Perjuangan mendekatkan diri dengan kalangan Islam. “Bagi saya, ini biasa saja, tak lebih dari move politik,” katanya kepada SH, Kamis (29/3) siang.

Maswadi menyatakan pembentukan sayap itu merupakan bagian dari usaha PDI-Perjuangan untuk menghilangkan kesan sebagai “partainya orang Kristen” dan yang lebih penting lagi adalah usaha untuk meraih kembali kemenangan yang pernah diperoleh pada Pemilu 2004. Menurutnya, partai memang harus berusaha keras untuk meyakinkan pemilih atau konstituennya agar pada pemilu mendatang memberikan suara pada partainya. “Jadi, ya ini usaha PDI-Perjuangan, berhasil atau tidak tergantung langkah selanjutnya terhadap kalangan Islam,” tambahnya.

Saat ini tampilnya ulama dan aktivis muslim yang memainkan peran dalam pembentukan Baitul Muslimin di PDI-Perjuangan sangat memberikan arti bahkan dalam peran ini dapat dihubungkan dengan sejarah kedekatan ulama pada masa orla dukungannya terhadap PNI yang terwakilkan partai Masyumi dan NU. dalam mengkaji tiga masa orla, orba, reformasi. tidak terlepas banyaknya aktivis muslim yang bernaung dalam PDI-Perjuangan. melihat banyaknya atau sedikit peran mereka dalam merubah image PDI- Perjuangan dalam pandangan umat Islam dan terlebih tujuan perpolitikan aktivis Baitul Muslimin didalam inklusifitas di partai PDI-Perjuangan tersebut.

Pendirian Baitul Muslimin Indonesia yang merupakan sayap partai dari PDI-Perjuangan lebih banyak pada agenda dakwah ke masjid ataupun ke tempat DPD PDI-Perjuangan yang ada di wilayah DKI-Jakarta dan Pengurus Daerah Baitul Muslimin yang lain. Agenda yang sering dilakukan adalah melakukan dzikir Mega, menerbitkan buletin, majalah bulanan, melakukan agenda keagamaan haji, korban pada acara hari raya dan membentuk lembaga zakat yang diberi nama LAZIS.

Baitul Muslimin yang lebih bertujuan untuk membangun citra partai dan untuk mengakomodir suara Islam yang belum terwadahi oleh PDI- Perjuangan dengan dilatarbelakangi kekalahan Mega-Hasyim pada pemilu 2004 dan suara 80% muslim yang tidak terwakilkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta karena faktor ketidakadilan. Baitul Muslimin adalah jawaban tentang koran beberapa waktu lalu yang mengatakan rumah muslim di kandang Banteng sehingga banyak mantan aktivis-aktivis PMII, HMI, GMMI, IMM, KAMMI dan lain-lain dan perwakilan ormas Islam baik NU maupun Muhammadiyah yang terlibat dalam pembentukan Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dan menjadi caleg PDI-Perjuangan.18

Perpolitikan di PDI-Perjuangan yang mencoba membangun image sebagai partai nasionalis spriritualis sehingga suara pemilih umat Islam diakomodir di Baitul Muslimin Indonesia yang pada era reformasi kalangan umat Islam, misalnya, mengkonsolidasikan diri dengan membentuk sejumlah partai politik Islam seperti, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Kesatuan

Bangsa, Partai Nahdhatul Ummah, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan lain- lain. kalangan nasionalis dikonsolidasikan melalui Partai Demokrasi Indonesia (Budi Hardjono), partai Demokrasi Indonesia, partai Keadilan dan Persatuan,

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian sosiologi historis yang menggunakan pendekatan sosiologis historis dan pendekatan rasionalistik. Pendekatan sosiologis historis berusaha untuk mengkaji peran-peran Ulama dan ormas- ormas Islam dalam pembentukan Baitul Muslimin. Pendekatan rasionalistik menitikberatkan pada Aspek rasional manusia sebagai landasan bagi terciptanya perilaku. Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis historis dan rasionalistik digunakan untuk mengkaji rasionalistik aktivis muslim dan para ulama serta ormasnya dalam upaya mendirikan Baitul Muslimin di markas PDI-Perjuangan menyikapi perpolitikan dimasa sekarang terutama dalam menampilkan wajah baru di PDI-Perjuangan dalam perpolitikan di Indonesia.

Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer dari wawancara langsung di lapangan dengan melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku dalam pendirian Baitul Muslimin Indonesia dengan mengemukakan informasi dan dokumentasi yang sudah tertulis dalam arsip. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, literatur, majalah, internet dan tidak menutup kemungkinan data-data diperoleh dengan melihat isu-isu politik yang terjadi dan wacana opini publik yang diwacanakan sebagai pengayaan data bagi penulis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menegakkan syariah Islam dan konfrontasi kekuatan politik Islam (pembaharuan) dengan negara orde baru (Adnan Amal, 2001). Peran penting kekuatan politik Islam dalam menumbangkan elemen-elemen orde lama, yang berarti, yang berarti memiliki saham besar dalam membidani lahirnya orde baru, mempengaruhi kondisi psikologis elit Islam untuk mereabilitasi Instrumen politik partai Islam (Dokumen Ir. Soekarno, 2005). Semangat umum strategi pengedepanan perjuangan umat melalui partai Islam sendiri mengkristal dikalangan pemimpin Islam karena persepsi mereka terhadap konstelasi politik kepartaian pada periode transisi orde lama ke orde baru.

Konfigurasi politik masa peralihan itu terlihat partai-partai Islam secara teoritik dalam struktur politik yang demokratis tidak akan mengalami pesaing politik berat, karena rival potensialnya PKI telah collops dan PNI mengalami keretakan internal yang serius. Namun strategi kaum muslim yang memfokuskan artikulasi politiknya melalui partai Islam ternyata berbenturan dengan strategi stabilitas politik Negara yang secara ketat membatasi politik kepartaian Gaffar, Affan, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004 (Gaffar, Affan, 2004). Perbedaan tajam logika strategi kekuatan Islam dengan negara orde baru diperuncing oleh dominasi kelompok abangan dan Kristen Katolik di berbagai sektor negara.

Dominasi kelompok minoritas yang paling menonjol peranannya dalam membentuk visi negara, yang dalam beberapa hal menyudutkan kaum Nasionalis, banyak dilakukan orang-orang di lingkungan Ali Muertofo dengan kelompok Tanah Abang atau CSIS-nya. Baru pada Akhir 1950-an banyak kesempatan anak santri menjadi calon jenderal yang tersalurkan pada Akademi Militer Nasional (AMN) yang baru dibuka. Keterlambatan dibidang militer ini terlihat juga hasilnya pada kepemimpinan militer dikemudian hari. Tatkala di birokrasi sipil dan dunia universitas pada tahun 1980-an anak-anak santri sudah trampil proporsional, di sektor militer pada dekade 1990-an. Apa yang penting dikemukakan dari berbagai pergeseran dinamika intelektual angkatan bersenjata diatas adalah suatu generasi baru di militer yang memiliki pandangan yang lebih simpatik terhadap masyarakat. Politik Islam telah mulai tumbuh, dengan demikian hubungan antara kekuatan politik Islam dengan militer sedang bergerak kearah perkembangan baru yang lebih baik.

Kenyataan politik yang dialami umat Islam itu merupakan persoalan yang mesti dipecahkan

kaum intelektual Islam persoalan itu antara lain, pertama mengapa umat Islam selalu dipojokkan sebagai golongan anti Pancasila padahal sila-silanya tak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan pada saat-saat menjelang proklamasi kemerdekaan para pemimpin Islam terkemuka ikut serta dalam mukadimah UUD 1945 kedua mengangkat persoalan politik (Iqbal Hasan M, 2002), yaitu mengapa golongan politik Islam tidak bisa ikut serta dalam memimpin negara dan duduk dalam pemerintahan seperti yang terjadi dalam satu dasa warsa sesudah 1945?, ketiga bagaimana sikap kaum muslimin terhadap arus modernisasi yang menjadi landasan kebijakan orde baru. Apakah mereka akan ikut serta dalam program pembangunan di Indonesia yang didukung oleh negara-negara barat itu?

Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan retrospeksi di kalangan intelektual muslim terhadap perjalanan politik yang telah dilalui umat Islam. Mereka umumnya berpendapat suatu gerak perubahan perlu segera dilakukan untuk menjawab berbagai problem yang dihadapi kaum muslimin. Pandangan ini memunculkan suatu gerakan apa yang disebut sebagai pemikiran baru Islam dikalangan intelektual muda Islam pada tahun 1970-an yang merupakan perkembangan radikal dalam pemikiran politik keagamaan umat Islam pada zaman orde baru. Gerakan “pemikiran baru” itu tidak saja membicarakan tentang Tuhan, manusia dan berbagai persoalan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan persoalan politik Umat Islam serta bagaimana melakukan terobosan-terobosan untuk mengembalikan daya gerak psikologis (*psychological striking force*) umat Islam dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran baru (intelektualisme baru) menurut Bahtiar Effendy (J. Prihatmoko, Joko, 2005), membawa tiga implikasi; mereformulasikan dasar-dasar keagamaan/teologis politik, mendefinisikan ulang cita-cita politik Islam, dan meninjau kembali strategi politik Islam.

Dalam kajian ini akan memfokuskan pada peninjauan ulang strategi perjuangan para tokoh Islam. Karena hal itulah yang banyak mempengaruhi aksi politik para pemimpin Muslim. Disamping itu, implikasi gerakan “pemikiran baru” yang mencakup reformulasi teologis dan redefinisi cita-cita politik Islam.

Rasa tak percaya terhadap efektifitas perjuangan politik umat melalui partai Islam merupakan gejala general dikalangan gerakan “pemikiran baru”. Bahkan Endang, dalam tesis menyebutkan “Islam Yes, Partai Islam No” memang tengah menggejala dikalangan umat. Pernyataan lebih eksplisit yang mengekspresikan pandangan sangat skeptis terhadap “partai Islam” juga ditemukan dalam beberapa tulisan Amin Rais, seorang Intelektual yang memiliki pengaruh luas di Muhammadiyah. Dalam sebuah refleksi terhadap dinamika politik Islam Indonesia, dia menyatakan: “Terbukti pada hasil pemilu, baik untuk parlemen maupun konstituante 1955, Empat partai Islam (Masyumi, NU, PSII, dan Perti) hanya berhasil mengumpulkan suara sekitar 42%. Demikian juga dalam pemilu 1971 (NU, Parmusi, PSSI, dan Perti), tahun 1977 dan 1982(PPP) menunjukkan bahwa partai Islam hanya mampu mencapai sepertiga dari jumlah suara. Bahwa mungkin ketiga pemilu di zaman “orba” disana-sini merupakan suatu kemungkinan, namun kiranya disepakati bahwa andai kata benar-benar LUBER pun, partai Islam tidak akan dapat mencapai mayoritas.”

Pandangan yang hampir sama, meskipun secara tidak langsung dinyatakan Abdurrahman Wahid tokoh sentral “pembaharuan Islam” dari NU ketika melakukan tinjauan kritisnya terhadap posisi gerakan Islam (Islamic Movement) dalam konstelasi orde baru: “Selanjutnya yang perlu kita garap adalah kelompok-kelompok strategis itu. Saya berkali-kali mengatakan bahwa keputusan politik: militer, birokrat, orpol, ormas, profesi, LSM, dan pers. Saya kira inilah kelompok-kelompok strategis”.

Dari ungkapan pemikiran Gus Dur (panggilan Abdurrahman Wahid) diatas, kita bisa mengungkap adanya semangat untuk tidak memandang “partai politik” sebagai instrument politik yang segala-galanya bagi umat Islam. Kalaupun harus melalui jalur “Partai Islam” seperti PPP, itu bukan satu-satunya bagi artikulasi politik kaum muslim.

Perpolitikan yang sekarang jauh dari rakyat adalah bukti kegagalan reformasi. Reformasi

yang banyak melibatkan ribuan orang yang terpengang dan kawan-kawan Aktivistis 98 yang gugur atas nama rakyat hanya jadi tumbal kekuasaan.

Kapan lagi menyuarakan suara rakyat yang sudah habis suaranya karena bungkaman dengan keadaan ekonomi dan pekerjaan yang sulit ditengah-tengah kondisi bangsa saat ini. Pemutusan pekerjaan (PHK), kasus lapindo, ISU fatwa MUI yang membingungkan masyarakat dan umat dengan masalah-masalah yang praktis belum terselesaikan apakah ini bukti bahwa hukum hanyalah pesanan pejabat bukan tuntutan penegakan hukum yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Mengapa hanya pencitraan atau kekuasaan sebagai saluran untuk ambisi sekelompok orang tanpa harus melihat hidup rakyatnya. Masih banyak anak-anak di kolong jembatan, masih banyak tugas negara untuk rakyatnya dalam mencerdaskan dan membesarkan tunas bangsa.

KKN yang didengungkan hanya jadi logo negara, bukti tidak ada, yang lemah tetap tak berdaya dan selalu teraniaya, yang miskin semakin miskin dan yang pusat hanya bicara uang rakyat. Kapan suara rakyat didengar oleh pejabat karena banyak agenda asing di negaraku. Tentara dan polisi hanya pengawal segelincir kepentingan yang membayar, rakyat butuh tentara yang idealis dan patriotis dan merakyat karena rakyat dan tentara tidak bisa dipisahkan ibarat daun dan pohon saling menguntungkan.

Negara hanya mengurus masalah yang tidak penting atau tidak krusial. Sedangkan kelaparan dan kasus bunuh diri terus bertambah. Saat ini rakyat dipimpin dalam keadaan lapar, rakyat dipimpin dalam keadaan sakit dan pejabat bernostalgia dengan KPK, berapa yang berhasil dikumpulkan oleh Negara tidak dipublikasikan kepada rakyat. Bagi yang menjabat atau tangan panjang pejabat atau para calo parpol tidak gelisah tapi apa tidak gelisah kawan-kawan yang tergusur, kawan-kawan yang tidur di kolom jembatan.<sup>5</sup> Pemikiran saya tentang demokrasi adalah hasil karya pejabat saja tanpa poling kerakyat. Kalau anda bilang sudah besar anda masih kecil kalau anda bilang sudah berjuang maka anda masih kecil kalau anda bilang sudah berkorban itu bohong karena hidup ini adalah bagian dari berjuang, berkorban dan besar (Manan Munafrizal, 2005). Kebesaran kita adalah buah karya rakyat bukan ego kita saja. Do'a mereka dan keputusan yang diatas yang semata-mata mengangkat kita dalam derajat yang tinggi. Tanpa kita meninggalkan usaha dan doa karena itulah yang bisa kita lakukan. Bagi penulis kalau memandaikan orang yang sudah pandai itu bukan perjuangan tapi mengangkat anak kolom jembatan menjadi besar itulah seorang yang demokratis, bukan mengirim keluar negeri orang yang terpilih baru pulang ke luar negeri hanya penindas baru. Maka itu bukan pemerataan, tapi beasiswa tidak tepat sasaran.

Demokrasi bicara kesejahteraan apakah kesejahteraan hanya untuk satu golongan atau wadah maka itu bukan demokrasi tapi antek penindas. Demokrasi harus jauh dari penindasan dan pembunuhan jiwa, fisik serta intelektual. Demokrasi harus membawa rakyat kepada kemajuan bukan membicarakan siapa saya dan ini saya tapi demokrasi harus bicara rakyat. Apa saat ini kita bisa bekerja untuk rakyat apa kita sudah membaur dengan rakyat dan apakah kita sudah mendengar rintihan rakyat ataupun bisa bangga dengan rakyat kita. Kekuasaan demokrasi harus di tangan rakyat bukan segelincir demokrasinya pejabat (Megawati, 2001). Pemimpin rakyat harus turun ke pelosok desa bukan hanya dengan pengawal pemimpin harus melayani keperluan rakyat baik sarana ibadah, pangan, sandang, dan papan karena pada pemimpin mengamanahkan amanat pada pemimpinnya.

Pertarungan para pemimpin saat ini lebih pada wacana, dan wacana dipertainkan media dan media bisa menyingkirkan penguasa. Anda pernah menyaksikan kepemimpinan yang merakyat digulingkan kepentingan barat siapa dia? Dan sekarang bermain pada partai apa dan sebagai penjaga gawang atau guru bangsakah beliau? Anda pasti tahu dan siapa yang tegas memimpin bangsa anda yang bisa bicara? Yang jelas pemilu 2009 adalah rakyat yang memilih dan yang bicara. Kalau anda bilang Islam kaffah, maka 2009 Anda harus bicara pemimpin yang kaffah yang benar-benar bicara rakyat. KH. Abdurahman wahid bicara pada Kick Andy bahwa beliau menempatkan kepemimpinannya pada tiga pilar (1) tentang Keislaman (2) Keindonesiaan (3) kemanusiaan menekankan pada demokrasi, pluralism, dan persamaan dalam hukum.

Taufiq Kiemas tokoh yang menyatakan sebagai penjaga gawang nasionalisme yang bicara

pada majalah bulanan terbitan Baitul Muslimin Press yang mengatakan sebagai sebuah partai nasionalisme sebagai Ideologi dan alat perjuangan dan tetap utuhnya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai tujuan utama perjuangan politik, PDI-Perjuangan tak akan berhenti mengajak semua elemen bangsa untuk berdialog, bertukar pikiran, dan bersinergi dalam membangun bangsa kita yang besar, bangsa Indonesia. Didirikannya Baitul Muslimin Indonesia, dimana para aktivisnya datang atau sengaja didatangkan dari berbagai organisasi berbasis keislaman yang berbeda-beda, adalah bukti kongkrit bahwa partai ini selalu siap membina pluralism yang tumbuh subur.

### **Agama dan Politik**

Kampanye pemilu mengungkapkan adanya perubahan pandangan dalam tubuh NU berkaitan dengan masalah politik dan agama. Kedua masalah tersebut sebelumnya tidak tumpang tindih. Para pemimpin NU terus menerus menganjurkan anggotanya agar memanfaatkan acara-acara keagamaan untuk mempromosikan kepentingan partai. Terutama didorong untuk menyelenggarakan upacara dan perayaan-perayaan yang paling banyak menarik peminat dari masyarakat setempat dan mampu menciptakan kesan yang baik terhadap NU. Misalnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra' Miraj, tahlil, khaul, atau khitanan massal. Anggota NU juga diperintahkan untuk membantu para calon pemilih, seperti ikut mengatur upacara perkawinan dan pemakaman sehingga bisa mendatangkan rasa hutang budi. Walaupun aktivitas seperti itu selalu dilakukan untuk kepentingan rohaniyah jama'ah setempat namun selama masa kampanye tujuannya lebih mengarah pada kepentingan politik.

Gambaran lain yang memperlihatkan kekaburan antara agama dan politik adalah penggunaan infaq dan zakat untuk membiayai pemilu. Infaq biasanya merupakan sumbangan untuk kepentingan agama atau sosial yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan atau perbaikan masjid, rumah sakit, panti asuhan atau sekolah. Akan tetapi selama masa kampanye, cabang-cabang NU menganggap bahwa sumbangan apapun yang berupa uang atau materi untuk tujuan pemilu dapat dikategorikan infaq, oleh karenanya sumbangan itu juga memberikan pahala bagi penyumbangannya. Yang lebih kontroversial lagi adalah sumber dana yang berasal dari zakat. Membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam setiap orang diwajibkan untuk menyumbang 2,5% dari kekayaan yang disumbangkan. Zakat biasanya diberikan untuk tujuan amal seperti membantu orang yang miskin dan lemah. Syuriah NU memutuskan bahwa zakat dapat digunakan untuk membiayai pemilu, dengan syarat hanya untuk membayar hutang-hutang yang menumpuk selama kampanye (Monsanto, 2008). Pemimpin partai yang pragmatis menyatakan bahwa berkurangnya berbagai kegiatan amal untuk sementara waktu karena akibat pengalihan infaq dan zakat, akan segera mendapat kompensasi lebih besar setelah NU berhasil dalam politik.

Contoh-contoh di atas merupakan bukti politisasi agama selama periode ini. Sebagai akibatnya, NU yang hingga pertengahan 1940-an merupakan organisasi keagamaan yang buta politik sekarang melihat politik dan agama sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Setiap bantuan yang diberikan untuk kepentingan partai selalu dianggap sebagai bantuan terhadap Islam terutama Islam tradisional. Seorang santri muda mengatakan pada Clifford Geertz sebelum pemilu: setiap orang menaruh minat pada politik... mereka menganggap kalau mereka menang dalam percaturan politik, nanti mereka tidak akan menemui kesulitan lagi dalam masalah Agama.

Kaum muslimin Indonesia atau aktivis muslim Indonesia (santri) sebagai pelaku sejarah. Artinya manusia muslim yang bersosialitas hendak menyejarah mengantisipasi kenyataan politik yang dihadapinya pada waktu itu, dengan berbekalkan iman, ilmu, pengalaman, dan kemampuan yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita politik yang dikembangkan dari keyakinan ontologis tertentu, iman Islam (P Huntinton, Samuel, 2004). Watak ganda manusia ini, spiritualitas dan materialitas, akan berbenturan dengan dirinya sendiri, kawan dalam kelompok antar kelompok yang dianggap sejalan, bahkan lebih sengit lagi diarahkan kepada mereka yang dianggap sebagai lawan yang kesemuanya berjalan tergantung pada kadar keimanan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk mengantisipasi kenyataan politik zamannya.

Indonesia (BAMUSI) dan adanya tokoh intelektual muslim seperti Din Syamsuddin ketua PB Muhammadiyah dan Hasyim Muzadi ketua PBNU, DR. Said Agiel Siroj, Prof. DR. Syafi'i Ma'arif, Taufiq Kiemas, dan Akbar Tanjung. Ini merupakan babak baru perpolitikan Islam di Indonesia dalam mengaktualisasikan antara nasionalis dan Islam dalam sebuah partai nasionalis PDI-Perjuangan. Merupakan cikal bakal Partai PDI-Perjuangan dalam membuka tabir kebuntuan pada pergulatan politik Islam dan politik Nasionalis pada masa orla, orba dan era reformasi (Soekarnoputri Megawati, 2007) yang lebih menyoroti fungsi ulama dan parpol didalam perpolitikan yang belum stabil atau sesuai tuntutan masyarakat yang menginginkan proses demokrasi yang diwujudkan dalam pemilu yang jujur, adil dan terbuka yang merupakan tuntutan seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat suku, ras, agama, keturunan, derajat, pangkat yang melekat dalam diri seseorang calon wakil rakyat.

PDI-Perjuangan yang merupakan partai nasionalis melalui Baitul Muslimin berusaha memadukan antara nasionalis dan spiritualis yang lebih menekankan Dakwah dalam kehidupan politik dan agama yang lebih dinamis, serta dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Baitul Muslimin melalui PDI-Perjuangan juga memandang penting masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Bicara ekonomi kerakyatan disatu sisi dan Bicara ekonomi islam dalam sisi yang lain serta masalah pemerintahan ataupun masalah kepemimpinan wanita (gender) dalam menyikapi itu Baitul Muslimin juga melakukan tanggapan tentang masalah gender. Baitul Muslimin juga berusaha menyikapi kasus-kasus lapangan yang terjadi di beberapa waktu yang tentang masalah Hukum (UU Pornografi dan Porno Aksi), masalah tragedi Monas AKKBP serta masalah HAM.

Ekonomi kerakyatan menduduki tempat yang sangat sentral dalam ideologi kerakyatan karena mempunyai posisi kunci dalam penyelenggaraan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta kebebasan dari kemiskinan dan keterbelakangan. Ekonomi kerakyatan adalah strategi untuk menghilangkan jarak dampak negatife ekonomi pasar yang terlalu mudah membuka peluang terciptanya proktariat dengan praktiknya yang eksploitatif.

Ekonomi kerakyatan adalah pelaksanaan strategi pembangunan berdasarkan pembagian merata dan meluas dalam hal kesempatan berusaha, dengan penyebaran secara hasil, baik secara horizontal (meliputi seluruh wilayah) maupun vertikal (daerah perkotaan maupun khususnya daerah pedesaan), investasi-investasi dalam segala usaha yang produktif dan efisien terciptalah fondasi yang kuat bagi keadilan dan pemerataan yang lebih berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Islam sejati.

### **Tertib Politik dan Kemosrotan Politik**

Kesenjangan politik yang paling penting antar negara pada hakekatnya tidak menyangkut masalah bentuk pemerintahannya perbedaan antara demokrasi dan kediktatoran ternyata tidak sebesar perbedaan yang terdapat antara Negara yang politiknya mencerminkan consensus, komunitas, efektifitas, stabilitas, dan Negara yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut (Sumawinata, Sarbini, 2004). Baik Negara-negara totaliter, komunis maupun Negara-negara liberal barat pada umumnya termasuk didalam konfigurasi sistem politik yang lemah, Amerika serikat, Inggris dan rusia masing-masing mempunyai bentuk pemerintahan berbeda namun didalam ketiga sistem tersebut jelas pemerintah berfungsi aktif.

### **Dinamika Demokrasi**

Sistem Pilkada di Indonesia sepanjang lebih dari setengah abad merdeka sebagaimana dipaparkan dimuka secara demokrasi tidak terlalu bergeser jauh dari sistem Pilkada masa penjajahan Belanda dan Jepang. baik pada masa pemerintahan orde lama maupun orde baru, hamper seluruh sistem dalam ketentuan perundangan yang digunakan menempatkan penguasa pusat, khususnya presiden dan menteri dalam negeri atau sebutan sejenis, dalam posisi sangat menentukan.

Pada masa reformasi demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dengan pemilihan langsung dan Pilkada langsung. Kendati begitu, meskipun belum maksimal, sejumlah kemajuan penting yang merupakan investasi politik untuk menopang terwujudnya demokrasi yang

terkonsolidasi telah diraih. Sedikitnya yaitu masih berlangsungnya liberalisasi politik bagi publik, tegaknya prinsip check and balances antar lembaga negara, dan upaya Presiden Abdurahman Wahid mengikis dominasi militer dalam konfigurasi politik Indonesia.

Pada periode Presiden Megawati saat ini, cita-cita merengkuh demokrasi yang terkonsolidasi itu masih belum surut, meskipun juga tidak terlalu menggebu. Tetapi sejumlah gejala yang muncul belakangan ini tampak berpotensi merintang jalan menuju demokrasi yang terkonsolidasi tersebut.

### **Moral Agama**

Indonesia dream adalah salah satu slogan yang kerap diagungkan oleh Marzuki Ustman. Muatan dari slogan itu adalah mimpi dari rakyat Indonesia yang kaya raya. Kendala untuk mewujudkan Indonesia dream-nya Marzuki dari aspek budaya, selain budaya dan sikap mental pragmatis yang cetak orde baru adalah juga kultur kolonialisme dan feodalisme. Bagi Marzuki, kultur warisan masa penjajahan ini menghambat proses pembentukan masyarakat yang secara hakiki betul-betul merdeka, yakni merdeka dalam berpikir, berbicara, dan berbuat.

Secara pribadi, dengan berbagi kontribusi yang telah diberikan melalui kebahagiaannya, yaitu selama masih hidup ingin menyaksikan kehebatan rakyat Indonesia. “Kebahagiaan bagi saya adalah ingin menikmati ketika saya masih hidup, bisa melihat rakyat, bisa melihat rakyat Indonesia hebat, seperti do’a Nabi Ibrahim yang meminta keturunan yang baik dan amal jariyah”, kata ayah saya ketika dia mau meninggal; dia bilang bahwa yang bisa membuat kita dan amal jariyah seperti membangun jalan, jembatan, dan ilmu yang diamalkan termasuk juga didalamnya, membangun sistem seperti yang dilakukan Bung Karno “jangan sampai saya termasuk orang yang menyaksikan kehancuran Indonesia” ujar Marzuki Ustman.

Masa depan syariah sekularisme dan perspektif Islam syariah memiliki masa depan yang lama dalam kehidupan publik masyarakat Islam. Islam syariah dapat berperan dalam menyiapkan anak-anak untuk hidup bermasyarakat, membina lembaga dan hubungan sosialisasi syariah, akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai etika (Nashihin et al., 2020) yang dapat direfleksikan dalam perundang-undangan publik melalui proses politik yang demokratis.

### **Islam dan Negara**

Sifat religius syariah dan fokusnya pada pengaturan hubungan antara tuhan dan manusia mungkin jadi satu-satunya alasan utama bertahan dan berkembangnya pengadilan-pengadilan sekuler yang berfungsi memutuskan perkara-perkara praktis dalam pelaksanaan peradilan dan pemerintahan secara umum. Aspek lain dari syariah hukum masyarakat Islam yang diasosiasikan dengan sifat religious (Novita et al., 2022) adalah perkembangan fatwa (ifta) ulama yang tidak terikat dengan negara mengeluarkan opini-opini hukum (fatwa) atas permintaan gubernur provinsi dan hakim-hakim negara, disamping memberikan nasehat pribadi kepada orang-orang, seperti yang terjadi pada masa Islam awal.

### **Zakat: Cita Agama Kerakyatan**

Konsep keagamaan (kerohanian) bagi kita keadilan sosial yang dimulai dari lapisannya yang paling bawah, yaitu rakyat jelata perlulah ditegaskan disini bahwa “zakat” bukanlah sesuatu yang khusus pada agama Muhammad SAW. Al-Qur’an sendiri menyatakan bahwa Nabi Isa pun telah mencanangkan enam abad sebelumnya. ia berkata aku ini adalah hamba Tuhan yang telah memberikan kepadaku kitab, menjadikan aku nabi dan memberkatiku dimanapun aku berada, serta mewasiatkan kepadaku sholat dan zakat selagi umat masih ada (QS. Maryam: 30-310).

Harapan PDI-Perjuangan dengan memberi peran ulama atau tokoh agama dan aktivis muslim (santri) dalam menjelaskan kadernya dalam memahaami konteks hidup beragama dan bernegara, dalam artian mengkaji dua pemikiran tokoh, dalam pemikiran Soekarno yang memisahkan agama dan negara dalam konteks pemisahan agama dan negara. Soekarno beranggapan bahwa persoalan agama dapat diselesaikan oleh pemeluk agama itu sendiri tanpa campur tangan negara sehingga agama bisa berkembang dan agama juga dapat memberikan masukan untuk negara.

Selain ini pemikiran Soekarno dalam politik Islam dan nasionalisme bisa dijadikan

pengkajian dalam pergulatan politik saat ini. Selain ini juga sebagai akulturasi kedua pemikiran politik tersebut. dalam hal ini, penulis ingin mengetahui klaim-klaim terhadap agama dan partai dalam pandangan para aktivis Baitul Muslimin di DPP PDI-Perjuangan di Jakarta.

## KESIMPULAN

Peranan para aktivis muslim sebagai pemersatu bangsa yang multikultural di PDI-Perjuangan. Dalam geraknya berdakwah para aktivis Baitul Muslimin Indonesia berusaha memberikan pencerahan dan membentuk moral (Massoweang, 2020) dan etika kader-kader PDI-Perjuangan. Peranan aktivis Baitul Muslimin Indonesia dalam pergulatan politik Islam dan nasionalisme dalam pemahaman aktivis muslim di Baitul Muslimin Indonesia DPP PDI-Perjuangan berusaha memberikan pemikirannya tentang Islam, kebangsaan yang multikultural di negara Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peranan Aktivis Muslim adalah untuk pencitraan PDI-Perjuangan dan sekaligus juga membuat nuansa partai dari partai nasionalisme sekuler menjadi partai nasionalisme religius. Peran ulama dan pemimpin ormas Islam. PBNU dan PP Muhammadiyah berusaha menjembatani, mengakomodir suara Islam dan merekomendir aktivis muslim dalam program Baitul Muslimin Indonesia untuk wong cilik, sejalan dengan pengentasan program kemiskinan dan mustadh'afin.

Move politik Baitul Muslimin Indonesia juga bermain dalam ranah pergulatan politik dengan menjadikan caleg-caleg yang siap bertarung sebagai konskuensi dari move politik dalam pemenangan PDI-Perjuangan di pemilu 2009 karena sebagai sayap Islam partai PDI-Perjuangan harus tampil “all out” dalam mendukung kemenangan PDI-Perjuangan yang seazas dan dalam tujuan strategis. Peranan Aktivis Baitul Muslimin Indonesia di PDI-Perjuangan dalam pergulatan politik Islam dan nasionalisme sangat signifikan terutama dalam hal dakwah dan merajut silaturahmi antar umat beragama, antar umat agama lain dan silaturahmi umat agama dan negara (dalam konteks kebangsaan) dalam upaya mencairkan dikotomi antar politik Islam dan nasionalisme.

## REFERENCES

- Adnan Amal, Taufik dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Islam*, Jakarta PustakaAlvabet, 2001
- Ahmad An-naim, Abdullahi, *Islam dan Negara Sekuler “Menegosiasikan Masa depan Syariah”*, PT MIZAN Pustaka, Anggota IKAPI, 2007.
- Arif, M. *Jejak-jejak Islam politik*, Sinopsis sejumlah Hakim studi islam Indonesia, Direktorat perguruan tinggi Agama Islam ditjen kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI, Jakarta 2004.
- Ardianta, S. (2022). Strategies for Utilizing Fiction Literature as an Antidote to Radical Islamic Understanding among Students of UIN KHAS Jember. *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(2), 122–130.
- Dokumen Ir. Soekarno, *Dibawah Bendera Reevolusi*, Yayasan Bung Karno, Jakarta: 2005.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004.
- Husna Nashihin. (2017). *Pendidikan Akhlak Kontekstual*. CV. Pilar Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=UBWiDwAAQBAJ>
- Iqbal Hasan M., *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Gralia Indonesia, 2002.
- Julkifli. (2022). Kedudukan dan Tugas Manusia dalam Perspektif Tafsir al-Qur’an Zubdatu At- Tafsir Karya Muhammad Sulaiman Abdullah Al Asyqar. *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(2), 103–110.
- J. Prihatmoko, Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*, LP3M Universitas Wahid Hasyim, Pustaka, 2005.
- Manan Munafrizal, *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, IRE Press Yogyakarta, 2005
- Megawati, *Dari Istana Menuju Istana Kedauletatan Rakyat*: Yogyakarta 2001 Monsanto, Luka, *Tangan Besi Seratus Tiran Penguasa Dunia*, Galang Press, Yogyakarta tahun 2008.

- Massoweang, A. K. (2020). Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadits. *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, 4(1), 41–57.
- Nashihin, H. (2019). Character Internalization Based School Culture of Karangmloko 2 Elementary School. *Abjadia*, 3(1), 81–90. <https://doi.org/10.18860/abj.v3i2.6031>
- Nashihin, H., Yahya, M. D., & Aziz, N. (2020). *Morality and Expression of Religious Moderation in "Pecinan"*. *Dalimunthe 2016*, 24158–24168.
- Nasihin, H., & Puteri Anggita Dewi. (2019). Tradisi Islam Nusantara Perspektif Pendidikan Multikultural. *Islam Nusantara*, 03(02), 417–438. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/135>
- Novita, M., Zakki, M., & Inayati, N. L. (2022). Implementasi Pendidikan Moral Dalam Membina Perilaku Siswa Di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al Huda. *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner*, 2(1), 95–105.
- P Huntinton, Samuel, *Tertib Politik, Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah*, PT Raja Grafindo persada 2004.
- Robbaniyah, Q. (2022). Eksplorasi Strategi Kontra Radikalisme pada Santri di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Baz Yogyakarta. *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, X(X), 1–10.
- Susanto, E. (2022). Konstruksi Pendidikan Islam Nusantara Berwawasan Multikultural di STAI Brebes Jawa Tengah. *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(1), 42–54.
- Soekarnoputri Megawati, *Departement Keanggotaan Organisasi DPP PDI- Perjuangan* 2007.
- Suhelmi Ahmad, Soekarno Versuss Nasir, *"Polemik Negara Islam"*, TerajuJakarta Selatan: 2002.
- Sumawinata, Sarbini, *politik Ekonomi kerakyatan*, PT Garindo pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Tono, Suwidi, Bung Karno *Negara Nasional dan cita-cita Islam*, Vision 03 Depok 2003.
- W. Hefner, Robert, *Civil Islam: Islam dan demokrasi di indonesia*, Jakarta: ISAI dan The Asia Fondation, 2001.